

BAB IV

ORGANISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA

1. Seperti telah diuraikan di bab-bab terdahulu, semula pengumpulan data statistik tanaman pangan dan hortikultura dilakukan oleh BPS dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura maupun Badan Pengendali Bimas secara terpisah. Cara ini mengakibatkan tersedianya beberapa data yang berbeda.
2. Sesuai dengan Intruksi Bersama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Kepala BPS Nomor : 20/DJPTP/VI/1975 tanggal 28 Juni 1975 dan adanya penyempurnaan P.2/1/II/1975 jenis data yang dikumpulkan maka :
 - a. Laporan luas tanaman, banyaknya pohon, luas/banyaknya pohon yang dipanen, produksi komoditas hortikultura, luas serangan/puso, penggunaan lahan dan alat mesin pertanian serta laporan perbenihan dilaksanakan oleh Mantri Tani (Mantan).
 - b. Laporan data hasil per hektar (ubinan) dilakukan bersama antara petugas BPS yaitu Mantri Statistik (ubinan nomor ganjil) dan sebagian dilaksanakan oleh Mantri Tani (ubinan nomor genap).
 - c. Laporan data Struktur Ongkos Usaha Tani dikumpulkan oleh Mantri Statistik.
 - d. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kepala Kantor Statistik daerah, bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
3. Laporan tingkat kecamatan tersebut dibuat rangkap 4, yang asli merupakan arsip KCD/Mantri Tani, dan yang lainnya dikirim ke BPS, BPS Propinsi dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Diperta) Kabupaten/Kota. Pengiriman ke BPS dilakukan melalui BPS Kabupaten/Kota dan BPS Propinsi. Untuk SP-IA, SP-IB, SP IV dan SP VA tidak dikirim ke BPS, tetapi digunakan untuk pengolahan di BPS Kabupaten/Kota.
4. Diperta Kabupaten/Kota diharuskan membuat rekap SP (RKSP) dan bersama-sama dengan BPS Kabupaten/Kota melaksanakan penghitungan produksi

5. Diperta Propinsi diharuskan membuat rekap SP (RPSP) dan bersama dengan BPS Propinsi mengadakan penghitungan produksi dan pembuatan ramalan produksi untuk kepentingan daerah.
6. Di tingkat Pusat, BPS berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan penghitungan produksi dan pembuatan ramalan produksi untuk kepentingan nasional.